SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. SOP Penyusunan Rencana Tindak

		Pelaksana								
No.	Kegiatan	ВРК	Kadis	Sekretaris	Inspektur	Tim Monitoring	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Laporan Hasil Temuan BPK						Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	1 hari	Disposisi	LHP BPK disampaikan Ka OPD dengan tembusan kepada Inspektur
2	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK						Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	1 hari	Disposisi	LHP BPK diterima Ka OPD dengan tembusan kepada Inspektur
3	Mengadakan Rapat dan menyusun Rencana Tindak lanjut						Disposisi	5 hari	Konsep Rencana Tindak	Koordinasi antara Kabag TU sebagai penanggung jawab dengan Inspektur dan Tim Monitoring
4	Menandatangani Rencana Tindak						Konsep Rencana Tindak	2 hari	Dokumen Rencana Tindak	Formulir Rencana Tindak sesuai format
5	Menyampaikan Rencana Tindak ke BPK									

B. SOP Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut

	Monitoring renyelesalah midak	Pelaksana				Mutu Baku				
No.	Kegiatan	врк	Tim Monitoring	Kadis	Sekretaris	Unit Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Laporan hasil pemeriksaan BPK						LHP BPK Rencana Tindak	1 hari	LHP BPK	
2	Membuat Nota Dinas untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK						LHP BPK Rencana Tindak	5 hari	Konsep Nota Dinas LHP BPK	
3	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep nota dinas		Tidak		Ya		Konsep Nota Dinas LHP BPK	1 hari	Konsep Nota Dinas LHP BPK	
4	Menandatangani nota dinas						Konsep Nota Dinas LHP BPK	1 hari	Nota Dinas LHP BPK	
5	1. melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Menyampaikan dokumen tindak lanjut						Nota Dinas LHP BPK	20 hari	Dokumen Tindak Lanjut	Disertakan dengan data dukung Tembusan ke Inspektorat
6	meneruskan dokumen tindak lanjut						Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	Dokumen Tindak Lanjut	

7	meneruskan dokumen tindak lanjut		1		Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	Dokumen Tindak Lanjut	
8	Mengevaluasi Dokumen Tindak Lanjut	Ya	Tidak		Dokumen Tindak Lanjut	15 hari	Hasil evaluasi Dokumen Tindak Lanjut	
9	Memperbaiki Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK				Hasil evaluasi Dokumen Tindak Lanjut		Dokumen Tindak Lanjut yang sudah diperbaiki	
10	Menyusun Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut				Dokumen Tindak Lanjut Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	5 hari	Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai Format
11	Memeriksa Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tidak			Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 hari	Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	
12	Menandatangani dan menyampaikan ke BPK		Ya		Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 hari	Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai Format

	Name of COD				
	Nomor SOP Tanggal Pembuatan	02 Januari 2023			
	Tanggal Revisi	02 Januari 2023			
and a second		02 Januari 2023			
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Tanggal Efektif Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT			
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT		DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PERUMAHANTAT DAN KAMASAN PERMUKIMAN, DINAS PERUMAHANTAT DAN KAMASAN PERMUKIMAN, MAN PERMUKIMAN NIP. 19691024 199803 1 007			
SUB BAGIAN RENJA, MONEV DAN KEUANGAN	Judul SOP	Monitoring PenyelesaianTindak Lanjut			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	<u>.</u>			
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan RI Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 	2. Memahami temuan hasil pemeriksaan BPK beserta rekomendasinya				
 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan 					
Gubernur Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Audit Kinerja	- DPA SKPD				
2. SOP surat masuk	- Komputer				
3. SOP Surat keluar	- Alat Tulis Kantor (ATh	<)			
Peringatan	Pencatatan dan pendata	an			
Jika SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan	1. Laporan Hasil Pemerik				
tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi BPK berakibat temuan masih terbuka.	2. Format Rencana Tindak lanjut				
tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi bi 18 berakbat temdan masin terbuka.	z. i omiat Konoana mia				